Analisis Putusan Pengadilan Perkara Tindak Pidana Pembunuhan Berencana secara Bersama-Sama

Diding Suryadi dan Diding Rahmat
Fakultas Hukum, Universitas Kuningan, Indonesia.
Email: wow.kuningan@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to determine the regulation of material criminal law against perpetrators of criminal acts of premeditated murder and judges' decision in imposing criminal defendant criminal acts of murder committed jointly on criminal case Number 33/PID.B/2015/PN.KNG. This type of research was normative juridical with the stages of research including: literature research and field research. Data was collected in the form of interview with qualitative analysis method. The result of the research was the regulation of the criminal law material against the perpetrators of the crime of premeditated murder committed in Decision Number 33/PID.B/2015/PN.KNG was appropriate and judge's consideration before passing the decision No. 33/PID.B/2015/PN.KNG was in conformity with applicable law.

Keywords: Criminal, Murder and Judge's Decision

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG. Jenis penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan tahapan penelitian meliputi: penelitian pustaka dan penelitian lapangan. Alat pengumpul data berupa wawancara dengan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG sudah tepat dan pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No.33/PID.B/2015/PN.KNG sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Kata Kunci: Putusan Hakim, Tindak Pidana, dan Pembunuhan Berencana

PENDAHULUAN

Semenjak manusia dilahirkan, manusia telah berhubungan dengan manusia lainnya dalam wadah yang dikenal sebagai masyarakat. Mula-mula ia berhubungan dengan orang tuanya dan setelah usianya meningkat dewasa ia hidup bermasyarakat, dalam masyarakat tersebut manusia saling berhubungan dengan manusia lainnya, sehingga menimbulkan kesadaran pada diri manusia bahwa kehidupan dalam masyarakat berpedoman pada suatu aturan yang oleh sebagian besar warga masyarakat tersebut ditaati. Hubungan antara manusia dengan manusia dan masyarakat diatur oleh serangkaian nilai-nilai dan kaidah-kaidah.¹ Dari nilai-nilai dan kaidah-kaidah yang dianut oleh masyarakat tersebut maka lahirlah hukum sebagai aturan yang mengatur tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat agar tercipta ketertiban, ketenangan, kedamaian dan kesejahteraan.

Hukum pidana merupakan aturan yang diadakan oleh suatu negara yang menentukan tentang perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan atau dilarang yang diancam oleh pidana tertentu bagi siapa yang melanggarnya dan menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi hukuman

¹ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 1.

serta menentukan dengan cara bagaimana hukum itu dapat dijalankan atas perbuatan yang telah dilakukan. Perbuatan yang dilarang tersebut seperti pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.² Hukum pidana sebagai sarana untuk menjamin keamanan, ketertiban dan keadilan, yang untuknya hukum pidana dapat membatasi kemerdekaan manusia dengan menjatuhkan/ menetapkan pidana penjara (kurungan) dan bahkan lebih dari itu hukum pidana dapat menghilangkan nyawa manusia dengan pidana mati. Kejahatan merupakan perilaku seseorang yang melanggar hukum positif atau hukum yang telah dilegitimasi berlakunya dalam suatu negara. Ia hadir di tengah masyarakat sebagai model perilaku yang sudah dirumuskan secara yuridis sebagai pelanggaran dan dilarang oleh hukum dan telah ditetapkan oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³ Kejahatan merupakan delik hukum, artinya kejahatan merupakan pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti pembunuhan. Pembunuhan dapat dilatarbelakangi oleh beberapa faktor, seperti kecemburuan sosial, dendam dan faktor psikologi pelaku kejahatan.⁴

Pembunuhan itu sendiri diatur dalam Pasal 338 KUHP yang menyatakan barangsiapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Kejahatan pembunuhan merupakan tindak pidana materiil karena akibat yang muncul dari perbuatan tersebut yang dilarang, akibatnya yaitu hilangnya nyawa orang lain. Dalam rumusan Pasal 338 KUHP tersebut menghilangkan nyawa orang lain merupakan wujud perbuatan atau salah satu syarat terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana dalam hal ini yaitu unsur obyektif. Dalam beberapa kasus kejahatan seperti kasus pembunuhan yang telah dibahas sebelumnya, ada beberapa kasus yang pelaku tindak pidananya lebih dari satu orang dimana dalam melakukan tindak pidana, pelaku tidak melakukannya sendirian, terdapat seorang atau beberapa orang yang terlibat dalam tindak pidana tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP, bahwa apabila terdapat seorang atau lebih dari seorang yang ikut serta dalam suatu tindak pidana dapat pula dipidana, yang berarti tidak hanya pelaku tindak pidana itu saja yang dapat dipidana.

Ada beberapa penggolongan peserta pelaku tindak pidana penyertaan yang terdapat dalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP yaitu, orang yang melakukan (pembuat: *pleger*), orang yang menyuruh melakukan (pembuat penyuruh: *doen pleger*), orang yang turut serta melakukan (pembuat peserta: *medepleger*), orang yang sengaja menganjurkan (pembuat penganjur: *uitlokker*), dan pembantuan (*medeplichtig*). Pasal-pasal tersebut merupakan dasar hukum yang menjadi acuan hakim untuk menentukan kedudukan pelaku dalam melakukan tindak pidana dan sanksi yang akan dikenakan terhadap pelaku tindak pidana penyertaan. Hakim dalam menentukan sanksi pidana terlebih dahulu harus menafsirkan

² Wajdawati, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKJ)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014, hlm. 13-14.

³ Andi Dedy Herfiawan, 2013, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No: 212/PID.B/2011/PN.Pinrang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013, hlm. 2.

⁴ Wajdawati, 2014, *Op.Cit.*, hlm. 14.

pasal-pasal tersebut, dalam hal ini pelaku termasuk kategori apa, dan kemudian dapat mengambil putusan sanksi pidana yang akan dikenakan kepada pelaku tindak pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama, Pengadilan Negeri Kabupaten Kuningan pernah menangani kasus tersebut dimana dua tersangka divonis penjara seumur hidup. Kasus ini cukup menarik karena dua tersangka sempat mencoba melakukan pembunuhan terhadap korban sebanyak dua kali namun tidak berhasil. Caranya dengan memberikan racun tikus kepada minuman, pembunuhan akhirnya dilakukan dengan menikamkan pisau saat korban sedang tertidur. Begitu sadisnya sehingga tindak kejahatan ini dinilai sangat kejam, bagi para pelaku seyogyanya mendapat hukuman terberat yakni hukuman mati. Namun demikian, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan menjatuhkan pidana seumur hidup kepada dua tersangka. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat dilakukan identifikasi masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimanakah pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama? Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama pada perkara pidana Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG?

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan cara normatif, yakni menggunakan metode deskriptif-analitis. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin dan norma hukum yang berkaitan dengan pembuktian perkara pidana. Tahap penelitian yaitu penelitian pustaka (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa catatan dan wawancara dengan pihak yang terkait dalam penelitian ini. Penulis dalam menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian menggunakan teknik analisa data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data yang deskriptif. Adapun tempat atau lokasi penelitian dalam rangka penulisan karya ilmiah ini yaitu di Kabupaten Kuningan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum Pidana Materiil terhadap Kasus Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Hakim Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG)

Untuk membuktikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum bahwa para terdakwa melakukan tindak pidana pembunuhan yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka unsur-unsur tentang tindak pidana tersebut harus terpenuhi seluruhnya. Adapun unsur-unsur tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama atau Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP yaitu: barangsiapa; dengan sengaja; direncanakan terlebih dahulu; menghilangkan nyawa orang lain; dan yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan. Untuk membuktikan masing-masing unsur tersebut, berikut hasil pengajian penulis:

a. Barang Siapa

Barang siapa disini adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab yang didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geetelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan sebagai “dalam keadaan sadar”. Berdasarkan fakta-fakta yang muncul dipersidangan terungkap bahwa terdakwa MUHAMMAD ARIF Bin ADE SUPIYANDI adalah subjek hukum yang dalam keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), oleh karenanya mengenai unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi.

b. Dengan Sengaja

Bahwa mengenai unsur kedua yang dimaksud “dengan sengaja” atau “opzetilijk”, undang-undang tidak memberikan pengertian yang jelas tentang maknanya. Tetapi dalam doktrin hukum pidana diketahui bahwa “dengan sengaja” atau “opzetilijk” haruslah menunjukkan adanya hubungan sikap batin pelaku, baik dengan wujud perbuatan maupun dengan akibat dari perbuatannya.

Jika dihubungkan dengan arti “dengan sengaja” di atas didapati kenyataan bahwa penikaman yang dilakukan oleh terdakwa adalah suatu perbuatan yang dikehendaknya, hal ini dapat dilihat dari upayanya untuk memberikan racun tikus kepada korban saat hendak berangkat ke Kabupaten Kuningan. Karena gagal, kemudian Terdakwa bersama saksi Jeni melakukan kembali upaya pembunuhan dengan cara menikamkan pisau ke tubuh korban di lokasi Rest Area Cirendang Kabupaten Kuningan hingga meninggal dunia. Jasad korban pun dibuang di pinggir jalan.

Adapun kehendak dan pengetahuan terhadap hubungan antara perbuatan dengan akibat yang akan muncul sudah diketahui terdakwa sebelum melakukan perbuatannya itu atau setidaknya pada saat memulai perbuatan tersebut. Oleh karena itu maka unsur kedua ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

c. Direncanakan Terlebih Dahulu

Direncanakan terlebih dahulu memiliki arti, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan bagaimana perbuatan itu dilakukan. Kemudian tempo ini tidak boleh terlalu sempit dan yang terpenting masih ada kesempatan baginya untuk mengurungkan niatnya membunuh.

Seperti dalam kasus ini, telah terungkap penusukan yang dilakukan oleh terdakwa akibat ingin menguasai mobil yang telah dirental sebelumnya. Fakta-fakta tersebut telah menunjukkan bahwa niat untuk membunuh korban telah ada dan ia mempunyai waktu atau kesempatan untuk mengurungkan niatnya tetapi tidak dilakukan. Justru dalam melakukan perbuatannya itu telah ada persiapan yaitu terdakwa membeli racun tikus. Karena gagal membeli barang itu, terdakwa sengaja membeli pisau untuk membunuh korban, sehingga menjadi bukti secara sah dan meyakinkan.

d. Menghilangkan Nyawa Orang Lain

Mengenai unsur “menghilangkan nyawa orang lain” dalam literatur hukum pidana haruslah dipenuhi 3 (tiga) syarat yaitu, adanya wujud perbuatan, adanya suatu kematian, dan adanya hubungan sebab akibat (causal verband) antara wujud perbuatan dengan akibat kematian (hilangnya nyawa orang lain).

Mengenai wujud perbuatan, dapat dilihat dalam bentuk gerakan dari sebagian anggota tubuh pada saat melakukan perbuatan tersebut. Dalam hal ini, dalam persidangan didapati fakta bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan cara menusukan pisau kepada korban. Setelah itu saksi Jeni Mulyana yang duduk di belakang supir kursi bagian tengah langsung menikam korban dari belakang ke arah bagian leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian saksi Jeni Mulyana menutupi wajah korban dengan menggunakan jaket saksi Jeni Mulyana dan Terdakwa langsung menancapkan pisau ke arah bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa hendak menusuk lagi dada Korban namun tusukan yang ketiga meleset dan mengenai tangan kiri Terdakwa yang saat itu digunakan untuk menahan dada Korban. Setelah Korban tidak bergerak lagi, kemudian saksi Jeni Mulyana memindahkan Korban ke kursi mobil bagian tengah dibantu oleh Terdakwa lalu saksi Jeni Mulyana ke kursi supir sedangkan Terdakwa tetap duduk di depan samping kursi supir. Dengan demikian nyatalah terungkap bahwa telah ada wujud dari perbuatan yang dimaksud.

Mengenai adanya kematian, di persidangan terungkap bahwa korban Wahid Kuniawan Sugiarta mengalami luka-luka sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Sebagaimana diuraikan dalam Visum et Repertum dari Nomor: R/VER-001/I/2015/Dokpol tanggal 12 Januari 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nurul Aida Fathya, SpF, dokter Spesialis Forensik di Bidang Kedokteran dan Kesehatan POLDA Jawa Barat (terlampir dalam berkas perkara), menyimpulkan sebagai berikut:

Pada mayat laki-laki berumur antara dua puluh hingga tiga puluh tahun ini, ditemukan enam buah luka terbuka yang tersebar pada leher, dada, punggung dan lengan bawah kanan akibat kekerasan tajam. Luka terbuka pada lengan bawah kanan menurut pola dan gambarannya sesuai dengan luka tangkis. Memar pada usus halus akibat kekerasan tumpul. Selanjutnya luka terbuka pada leher memotong otot leher, kelenjar gondok serta pembuluh balik besar leher. Luka terbuka pada dada kiri memotong otot dada, sela iga, kandung jantung, sekat rongga dada, hati bagian kiri serta lambung. Luka terbuka pada dada kanan memotong iga, menembus paru, sekat rongga badan hingga hati. Pendarahan dalam rongga dada kanan dan kiri serta rongga perut secara keseluruhan ditemukan sebanyak seribu enam ratus mililiter. Kedua paru tampak kempis, organ-organ dalam lainnya tampak pucat. Menurut pola dan gambaran luka, luka terbuka diakibatkan oleh senjata tajam bermata satu dengan lebar senjata minimal satu koma empat centimeter dan panjang senjata minimal empat belas koma empat centimeter.

Sebab mati akibat kekerasan tajam pada dada kiri yang memotong kandung jantung, hati serta lambung dan menimbulkan pendarahan. Luka terbuka pada leher secara tersendiri juga dapat menimbulkan kematian. Perkiraan saat kematian antara dua belas sampai delapan belas jam sebelum pemeriksaan luar yakni tanggal tujuh Januari tahun dua

ribu lima belas antara pukul dua lewat tiga puluh menit hingga pukul delapan lewat tiga puluh menit waktu Indonesia Bagian Barat.

Dengan demikian mengenai kematian korban ini telah nyata terungkap dipersidangan. Mengenai hubungan causal verband antara wujud perbuatan dengan kematian korban, dalam literatur hukum pidana dikenal adanya beberapa teori seperti: teori syarat condition sine qua non atau teori khusus, dan lain-lain. Akan tetapi untuk memberikan pegangan kiranya dapat dijadikan landasan dalam menentukan mengenai hubungan causal verband adalah arrest Hoog Militier Gerechtschof tanggal 8 Februari 1924 yang menyatakan “sebab dari akibat dapat dilihat dari adanya hubungan langsung antara perbuatan dengan akibat”. Karena perbuatan para terdakwa telah mengakibatkan hilangnya nyawa korban Wahid, sehingga terhadap unsur ini penulis berpendapat telah terpenuhi.

e. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Melakukan Perbuatan

Unsur ini merupakan bentuk dari penyertaan (deelneming), yang oleh Pompe dikatakan bahwa “yang harus dipandang sebagai pelaku dalam suatu tindak pidana adalah orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut melakukan.

Dalam kasus ini, selama persidangan didapati fakta bahwa terdakwa melakukan penikaman dengan cara menusukan pisau kepada korban. Setelah itu saksi Jeni Mulyana yang duduk di belakang supir kursi bagian tengah ikut menikam korban dari belakang ke arah bagian leher korban dengan menggunakan tangan kanan. Kemudian saksi Jeni Mulyana menutupi wajah korban dengan menggunakan jaket saksi Jeni Mulyana dan Terdakwa langsung menancapkan pisau ke arah bagian dada sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan bagian dada sebelah kanan Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan kanan. Setelah itu Terdakwa hendak menusuk lagi dada Korban namun tusukan yang ketiga meleset dan mengenai tangan kiri Terdakwa yang saat itu digunakan untuk menahan dada Korban. Setelah Korban tidak bergerak lagi, kemudian saksi Jeni Mulyana memindahkan Korban ke kursi mobil bagian tengah dibantu oleh Terdakwa lalu saksi Jeni Mulyana ke kursi supir sedangkan Terdakwa tetap duduk di depan samping kursi supir. Dengan demikian nyatalah terungkap fakta adanya satu orang lebih melakukan perbuatan kepada korban. Sehingga terhadap unsur ini majelis hakim berpendapat telah terpenuhi.

Dari penjelasan penulis di atas maka dapat dilihat dan disimpulkan bahwa perbuatan para terdakwa memang benar telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum. Kemudian, berdasarkan alat-alat bukti yang sah yang terungkap dipersidangan juga semakin membuktikan terdakwa memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Di dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, menyebutkan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan dilakukan. Asas legalitas ini tertuang langsung langsung dalam KUHP secara eksplisit. Hal ini berbeda dengan asas hukum pada umumnya yang tidak mencantumkan pasal tentang asas dalam pasal-pasalnyanya.

Von Feuerbach merumuskan adagium “*Nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*” bahwa tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu. Adagium ini

terkandung dalam bukunya *Lehrbuch des peinlichen Rechts* (1801). Asas legalitas yang dikemukakan oleh Feuerbach mengandung tiga pengertian:⁵

1. Tidak ada perbuatan dapat dipidana, apabila belum diatur dalam undang-undang.
2. Dalam menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut (*non retroaktif*).

Mengenai definisi asas legalitas ini terdapat kesamaan pandangan, yakni dari pendapat mereka dapat ditarik kesimpulan bahwa, tiada perbuatan dapat dipidana kecuali atas dasar kekuatan ketentuan pidana menurut undang-undang yang sudah ada terlebih dahulu. Dari definisi ini dapat ditarik dua hal penting yang perlu diulas yakni perbuatan yang dapat dipidana dan ketentuan pidana menurut undang-undang.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Tindak Pidana yang Dilakukan Secara Bersama-sama pada Perkara Pidana Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG

Suatu proses peradilan berakhir dengan putusan akhir (vonis) yang di dalamnya terdapat penjatuhan sanksi pidana (penghukuman). Di dalam putusan itu hakim menyatakan pendapatnya tentang apa yang telah dipertimbangkan dan apa yang menjadi amar putusnya. Sebelum sampai pada tahapan tersebut, ada tahapan yang harus dilakukan sebelumnya, yaitu tahapan pembuktian dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus berdasarkan pada dua alat bukti yang sah kemudian dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana yang didakwakan benar-benar terjadi dan terdakwa adalah yang melakukannya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 183 KUHP.

Kemudian, yang perlu dilakukan Hakim adalah, disyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukannya itu memenuhi unsur- unsur yang telah ditetapkan dalam Undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan dan kemampuan bertanggung jawab, seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan dan perbuatannya serta tidak adanya alasan pembeda/pemaaf atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya.

Dalam putusan nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG, proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Majelis Hakim menurut Penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang dipaparkan sebelumnya. Yaitu berdasarkan dua alat bukti yang sah, dimana dalam kasus ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti dipakai terdakwa melakukan pembunuhan.

Kemudian Hakim juga mempertimbangkan tentang pertanggung-jawaban pidana, dalam hal ini Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang timbul dipersidangan dan menilai terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Pertimbangannya, pada saat melakukan perbuatannya, terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkan. Dalam melakukan perbuatannya, terdakwa juga ada dalam kondisi yang sehat dan cakap untuk mempertimbangkan perbuatannya itu.

Selain itu, Hakim juga tidak melihat adanya alasan pembeda atau alasan pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Sama halnya dengan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim hanya melihat hal-hal

⁵ Fatoni Syamsul, *Pengantar Logika Hukum*, IMSN Media Utama, Surabaya, 2008, hlm. 52.

yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa orang lain dengan cara yang sangat keji dan terbilang sadis dan membuat luka yang dalam terhadap keluarga korban yang ditinggalkan. Adapun hal-hal yang meringankan: para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya dan terakhir terdakwa masih muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilaku.

Tetapi, di dalam menjatuhkan putusan hukuman penjara terhadap terdakwa, penulis menilai dengan vonis Majelis Hakim yang memberikan hukuman penjara masing-masing terdakwa selama seumur hidup masih berpeluang meningkat pada hukuman mati. Walaupun putusan yang ditetapkan hakim sudah sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang meminta hukuman penjara seumur hidup kepada terdakwa. Kasus pembunuhan berencana yang penulis bahas ini masuk kategori kejahatan yang berat, yaitu selain pembunuhan berencana sesuai Pasal 340, kejahatan ini juga masuk pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati sesuai Pasal 365 ayat 4.

Menurut **Roeslan Saleh**, KUHP Indonesia membatasi kemungkinan dijatuhkannya pidana mati atas beberapa kejahatan yang berat. Beberapa jenis kejahatan berat dimaksud di antaranya:⁶

- 1) Pasal 104 (makar terhadap presiden)
- 2) Pasal 111 ayat 2 (membujuk Negara asing untuk bermusuhan atau berperang, jika permusuhan itu dilakukan atau terjadi perang)
- 3) pasal 124 ayat 3 (membantu musuh waktu perang)
- 4) Pasal 140 ayat 3 (maker terhadap raja atau kepala Negara-negara sahabat yang direncanakan akan berakibat maut)
- 5) Pasal 340 (Pembunuhan Berencana)
- 6) Pasal 365 ayat 4 (pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati).
- 7) pasal 368 ayat 2 (pemerasan dengan kekerasan yang mengakibatkan luka berat atau mati)
- 8) Pasal 444 (pembajakan di laut, pesisir dan sungai yang mengakibatkan kematian).

Keadilan menurut hukum atau yang sering dimaksud dalam keadilan hukum (*legal justice*) adalah keadilan yang telah dirumuskan oleh hukum dalam bentuk hak dan kewajiban, dimana pelanggaran terhadap keadilan ini akan ditegaskan lewat proses hukum⁷. Hal ini menunjukkan bahwa jika seseorang telah melanggar keadilan tersebut, maka akan dikenakan hukuman lewat proses hukum. Keadilan sering kali dikaitkan dengan kejujuran (*fairness*), kebenaran (*right*), kepantasan atau kelayakan seseorang (*deserving*) dan lainnya yang banyak digunakan baik untuk memutuskan pembagian imbalan atau sumber daya. Istilah keadilan (*justice*) memang tidak mempunyai makna tunggal.⁸ Menurut filsuf Yunani yaitu, Aristoteles menyatakan bahwa ukutan dari keadilan bahwa:⁹

⁶ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 55.

⁷ Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rechtstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009, hlm. 207.

⁸ Fathul Lubabin Nuqul, *Nilai-nilai dalam Pertimbangan Seriousness of Crime Kajian pada Komunitas Muslim*. Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syir'ah, Vol. 45, No. 11. 1-11., 2008, hlm. 44.

⁹ Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 93.

- 1) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti sesuai hukuman atau *lawfull*, yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti.
- 2) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari haknya, sehingga keadilan berarti persamaan hak *equal*. Dalam hal ini *equality* merupakan proporsi yang benar, titik tengah, atau jarak yang sama antara terlalu banyak dengan terlalu sedikit. Menurut **Julius Stone** karena **Aristoteles** mengartikan keadilan sebagai sesuatu berkenaan dengan orang-orang, *justice is something that pertains to person*.

Berdasarkan teori tersebut maka putusan terhadap terdakwa dalam kasus yang dibahas pada penelitian ini dimana Majelis Hakim memberikan hukuman penjara masing-masing terdakwa selama seumur hidup dilandaskan kepada nilai keadilan sesuai pandangan hakim. Berdasarkan hasil wawancara, Majelis Hakim memutus penjara seumur hidup kepada kedua terdakwa karena jaksa penuntut umum sebagai perwakilan dari negara hanya menuntut seumur hidup dan tidak lebih. Selanjutnya, selama masa persidangan, tidak ada bukti baru yang memberatkan kedua terdakwa. Majelis Hakim dalam memutus perkara mempertimbangkan banyak hal mulai dari proses tindak kejahatan hingga dampak sosial. Untuk kasus pembunuhan berencana ini, Majelis Hakim menilai sudah cukup menjatuhkan hukuman sesuai dengan tuntutan jaksa. Penjatuhan hukuman kepada terdakwa didasari atas teori bahwa hukuman bagi yang melakukan tindak pidana bukan menitik beratkan kepada aksi balas dendam. Sebagai terdakwa yang dijatuhi hukuman oleh negara, seyogyanya diperhatikan dampak kehidupan sosialnya. Sehingga, pertimbangan hakim pada saat memutus sebuah perkara didasari atas fakta yang terjadi dalam persidangan.

Setiap hakim akan berbeda dalam menjatuhkan vonis hukuman kepada terdakwa meskipun perkaranya sama. Contoh perkara tindak pidana pencurian, hasil vonis majelis hakim yang satu dengan yang lain tidak akan sama karena tergantung kejadian dan fakta yang terjadi dalam persidangan. Dari fakta fakta yang terjadi dalam masa persidangan, majelis hakim akan menyimpulkan apakah terdakwa akan divonis berat atau ringan, divonis melebihi tuntutan atau malah sebaliknya. Semua tergantung bagaimana agar ada keadilan antara perbuatan dan hukuman yang akan dijatuhkan kepada terdakwa. Oleh karena itu, keputusan majelis hakim dalam perkara nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG menurut penulis sudah sesuai dengan keadilan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Pengaturan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan secara bersama-sama dalam putusan Nomor 33/PID.B/2015/PN.KNG menurut penulis sudah tepat. Jaksa Penuntut Umum menggunakan 5 (lima) dakwaan, yaitu: Primair Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidiar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar Pasal 355 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Lebih Subsidiar Lagi Pasal 351 KUHP, Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Lebih-Lebih Subsidiar Lagi Pasal 365 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Diantara unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum

tersebut, yang terbukti secara sah dan meyakinkan adalah Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, diantara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling mencocoki.

- b. Pertimbangan hakim sebelum menjatuhkan putusan No.33/PID.B/2015/PN.KNG menurut penulis sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku seperti yang diharapkan oleh penulis. Karena berdasarkan alat dua alat bukti yang sah, yang dalam kasus yang diteliti penulis ini, alat bukti yang digunakan Hakim adalah keterangan saksi dan keterangan terdakwa beserta alat bukti pembunuhan. Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta di persidangan menilai bahwa terdakwa dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya dengan pertimbangan bahwa pada saat melakukan perbuatannya terdakwa sadar akan akibat yang ditimbulkannya dan tidak mengurungkan niatnya. Pelaku dalam melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat dan cakap untuk mempertimbangkan unsure melawan hukum, serta tidak adanya alasan penghapusan pidana.

SARAN

Berdasarkan analisis hasil penelitian maka penulis menyampaikan saran bagi pihak terkait dengan penelitian berikut:

- a. Jaksa Penuntut Umum harus teliti dan cermat dalam menyusun surat dakwaan, mengingat surat dakwaan merupakan dasar bagi hakim untuk menjatuhkan atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku yang dihadapkan di muka persidangan. Selain itu, juga harus mempunyai pengetahuan atau ilmu hukum dengan baik, bukan hanya hukum secara formil tetapi juga hukum secara materil agar tidak salah dalam menentukan mana perbuatan yang sesuai dengan unsur yang didakwakan.
- b. Hakim tidak serta merta berdasar pada tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam menjatuhkan pidana, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim. Hakim harus lebih peka untuk melihat fakta-fakta apa yang timbul pada saat persidangan, sehingga dari fakta yang timbul tersebut, menimbulkan keyakinan hakim bahwa terdakwa benar dapat atau tidak dipidana. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan juga harus bisa memberikan hukuman yang sesuai untuk terdakwa berdasar faktor yang memberatkan atau meringankan sehingga menciptakan keadilan di dalam masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Chazawi, *Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Andi Dedy Herfiawan, 2013, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan No: 212/PID.B/2011/PN.Pinrang)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.
- Diding Rahmat. *Problematika Geng Motor Di Kabupaten Kuningan Dalam Prespektif Sosiologi Hukum*. ISSN 2354-5976 Vol. 01 Nomor 01 Januari 2014, hlm. 45-78.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.vii1.34>

- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia - Suatu Pengantar*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Fathul Lubabin Nuqul, *Nilai-nilai dalam Pertimbangan Seriousness of Crime Kajian pada Komunitas Muslim*. *Jurnal Ilmu Syari'ah Asy-Syiri'ah*, Vol. 45, No. 11. 1-11., 2008.
- Fatoni Syamsul, *Pengantar Logika Hukum*, IMSN Media Utama, Surabaya, 2008.
- Haris Budiman dan Gios Adhyaksa. *Implementasi Penerapan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban (Sudi Di Polres Kuningan)*. ISSN 2354-5976 Vol. 02 Nomor 01 Januari 2015, hlm. 49-66.
<https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i1.25>
- Komar Hidayat, Yunusrul Zen Dan Diding Rahmat, *Analisis Yuridis Terhadap Kebijakan Diversi Pemerintah Daerah Dalam Perlindungan Anak Di Kabupaten Kuningan*. Vol. 04 Nomor 02 Julii 2017, hlm. 86-97. <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v4i2.706>
- Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, *Panduan Pemasarakatan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*, Sekertaris Jendral MPR RI, Jakarta, 2010.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Sinar Bakti, Jakarta, 2009.
- Moeljatno, *Asas Asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2000.
- Munir Fuady, *Teori Negara Hukum Modern (Rehctstaat)*, Refika Aditama, Bandung, 2009.
- Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
- Samsul, "Rasionalitas Asas Legalitas terhadap Keadilan Hukum Pidana Indonesia", Artikel, Diakses dari: <http://www.asamsul.web.id> pada tanggal 13 Maret 2017.
- Sholehudin, U, *Hukum dan Keadilan Masyarakat Prespektif Sosiologi Hukum*, Setara Press, Malang, 2011.
- Suwaru Akhmaddhian dan Anthon Fathanudien. *Partisipasi Masyarakat dalam Mewujudkan Kuningan sebagai Kabupaten Konservasi (Studi di Kabupaten Kuningan)*. *Jurnal UNIFIKASI* Vol. 2 (1). 2015. DOI: <https://doi.org/10.25134/unifikasi.v2i1.26>
- Samsul, "Rasionalitas Asas Legalitas terhadap Keadilan Hukum Pidana Indonesia", Artikel, Diakses dari: <http://www.asamsul.web.id> pada tanggal 13 Maret 2017.
- Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Wajdawati, 2014, *Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Secara Bersama-Sama (Studi Kasus Putusan Nomor 26/Pid.B/2013/PN.PKJ)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2014.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2003.